



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lt. 6,7 dan 8
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079177 Fax. (021) 29079277 Situs : <https://badilag.mahkamahagung.go.id>
Surat Elektronik : ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 978 / DJA.3/ HK. 05/ 3/ 2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Permintaan Data

Jakarta, 16 Maret 2020

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh/
Pengadilan Tinggi Agama
Seluruh Indonesia

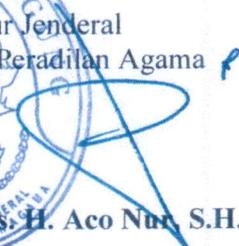
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Menindaklanjuti Memorandum Kepala Biro Hukum dan Humas MA RI Nomor: 89/Bua.6/HM.00/III/2020 dan Surat Kementerian Sekretariat Negara RI Nomor. B-51/Ses. Wantipres/DI.00.02/02/2020 tentang Permintaan Data, bersama ini kami sampaikan permintaan data tentang hasil Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*) namun belum dilakukan eksekusi periode tahun 2015 s.d bulan Februari 2020 (format terlampir).

Selanjutnya diharapkan Mahkamah Syar'iyah Aceh/ Pengadilan Tinggi Agama melakukan rekapitulasi data dari satker di wilayah masing masing dan mengirimkan laporan tersebut kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, selambat-lambatnya tanggal 19 Maret 2020 dalam **format excel** dan **pdf** yang sudah ditandatangani pejabat terkait melalui email stadok.badilag@gmail.com.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Agama

Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Kepala Biro Hukum dan Humas MA RI

Lampiran Surat
 Nomor : 978/DJA.3/HK.05/3/2020
 Tanggal : 16 Maret 2020

Rekapitulasi Perkara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap
 yang belum dilakukan Eksekusi
 Wilayah Mahkamah Syar'iyah Aceh/ Pengadilan Tinggi Agama.....
 Tahun 2015 s.d bulan Tahun 2020

No.	Satker	Nomor Perkara	Tanggal Putusan	Jenis Perkara	Tanggal Permohonan Eksekusi	Para Pihak		Upaya Yang Pernah Dilakukan	Kendala Eksekusi	Keterangan
						Pemohon	Termohon			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
Jumlah										

Mengegetahui
 Ketua

Tempat, Tanggal Tahun
 Panitera

(.....)
 NIP.

(.....)
 NIP.

Petunjuk Pengisian

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama satker
- Kolom 3 : Diisi dengan nomor perkara
- Kolom 4 : Diisi dengan tanggal putusan
- Kolom 5 : Diisi dengan jenis perkara
- Kolom 6 : Diisi dengan permohonan eksekusi
- Kolom 7 : Diisi dengan nama pihak apabila pihak yang mengajukan permohonan adalah pribadi/ swasta
 Diisi dengan nama instansi apabila pihak yang mengajukan permohonan adalah pemerintah
- Kolom 8 : Diisi dengan nama apabila pihak yang mengajukan permohonan adalah pribadi/ swasta
 Diisi dengan nama instansi apabila pihak yang mengajukan permohonan adalah pemerintah
- Kolom 9 : Diisi uraian upaya yang sudah dilakukan PA/MS setelah ada permohonan eksekusi
- Kolom 10 : Diisi dengan kendala yang dihadapi sehingga eksekusi tidak dapat dilakukan
- Kolom 11 : Diisi dengan keterangan



**MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13 TELP.3843348,3810350,3457661 FAX. 3810361
TROMOL POS NO.1020-JAKARTA 10110

M E M O R A N D U M

Nomor : 85 /Bua.6/HM.00/III/2020

Kepada : Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Dari : Kepala Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung RI
Lampiran : 2 (dua) rangkap
Sifat : PENTING
Hal : Permintaan Data
Tanggal : 9 Maret 2020

Menindaklanjuti disposisi dari Bapak Sekretaris Mahkamah Agung terkait Memorandum Bapak Panitera Mahkamah Agung mengenai Surat permintaan data hasil Putusan Pengadilan yang telah *inkracht* namun belum dieksekusi, khususnya perkara perdata antara masyarakat/swasta dengan Pemerintah periode tahun 2015 s.d 2020 dari Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Nomor B.51/Ses.Wantimpres/DI.00.02/02/2020 tanggal 14 Februari 2020 yang ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung, Kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak surat dan memorandum tersebut. (data terlampir)

Oleh karena materi surat tersebut merupakan kewenangan Bapak, mohon perkenan Bapak untuk menanggapi.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Kepala Biro Hukum dan Humas
Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI

Dr. Abdullah, SH., MS



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110, Telepon (021) 3444801, Faksimile (021) 3865092

Situs: www.wantimpres.go.id

Nomor : B- 51 /Ses.Wantimpres/DI.00.02/02/2020 Jakarta, 14 Februari 2020
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Data

Yth. Sekretaris Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Utara No.9-13
Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka memberikan dukungan data dan informasi kepada Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (**Wantimpres**) sebagai bahan masukan kepada Presiden, kami memerlukan data hasil putusan pengadilan yang telah *inkracht* namun belum dieksekusi, khususnya perkara perdata antara masyarakat/swasta dengan Pemerintah periode tahun 2015 s.d. 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara dapat memberikan data dimaksud sebagai prioritas pada kesempatan pertama. Untuk narahubung dapat menghubungi staf kami a.n. Ria Andayani (021-3512119/ HP.0817 057 0634)

Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris
Dewan Pertimbangan Presiden,

Agus Widodo

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pertimbangan Presiden
2. Panitera Mahkamah Agung

**Rekapitulasi Perkara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap
 yang belum dilakukan Eksekusi
 Wilayah Mahkamah Syar'iyah Aceh/ Pengadilan Tinggi Agama.....
 Tahun 2015 s.d bulan Tahun 2020**

No.	Satker	Nomor Perkara	Tanggal Putusan	Jenis Perkara	Tanggal Permohonan Eksekusi	Para Pihak		Upaya Yang Pernah Dilakukan	Kendala Eksekusi	Keterangan
						Pemohon	Termohon			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
Jumlah										

Mengegetahui
 Ketua

Tempat, Tanggal Tahun
 Panitera

(.....)
 NIP.

(.....)
 NIP.

Petunjuk Pengisian

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama satker
- Kolom 3 : Diisi dengan nomor perkara
- Kolom 4 : Diisi dengan tanggal putusan
- Kolom 5 : Diisi dengan jenis perkara
- Kolom 6 : Diisi dengan permohonan eksekusi
- Kolom 7 : Diisi dengan nama pihak apabila pihak yang mengajukan permohonan adalah pribadi/ swasta
 Diisi dengan nama instansi apabila pihak yang mengajukan permohonan adalah pemerintah
- Kolom 8 : Diisi dengan nama apabila pihak yang mengajukan permohonan adalah pribadi/ swasta
 Diisi dengan nama instansi apabila pihak yang mengajukan permohonan adalah pemerintah
- Kolom 9 : Diisi uraian upaya yang sudah dilakukan PA/MS setelah ada permohonan eksekusi
- Kolom 10 : Diisi dengan kendala yang dihadapi sehingga eksekusi tidak dapat dilakukan
- Kolom 11 : Diisi dengan keterangan